

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah bagian dari unsur pokok untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan dalam suatu organisasi kegiatan atau sebuah program, bisa dikatakan efektif apabila tujuannya tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hukum bisa dibilang efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, upaya hukum dalam mencapai sasarannya dengan cara membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan masalah efektivitas hukum, sehingga menjadi ciri khas hukum tidak hanya terdapat unsur paksaan eksternal akan tetapi tetap mengikuti proses pengadilan.¹

Efektivitas hukum selalu berhubungan dengan kesadaran dan pembentukan hukum. Kesadaran hukum itu sendiri adalah kesadaran nilai-nilai yang terkandung pada manusia terkait hukum yang berlaku. Kesadaran hukum erat hubungan dengan kepatuhan hukum, namun yang menjadi

¹Rizky Wiyanda Putra. 2018. *Tinjauan Yuridis Emperis Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Hal Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi*. Malang. Penelitian Penulisan Hukum. Fakultas Hukum. UMM. Hal.20.

pembeda adalah dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut terhadap sanksi yang ditetapkan.²

Berbicara tentang efektivitas hukum hanya bisa dijalankan dengan proses pendekatan sosiologis, salah satunya memperhatikan interaksi antara hukum dengan lingkungan sosial. Hukum tidak bisa dipandang sebagai institusi yang steril, melainkan selalu melalui proses uji kehadiran dan dampaknya terkait hasil dan akibat yang ditimbulkan pada lingkup kehidupan masyarakat yang luas. Hukum yang efektif berfungsi untuk merubah perilaku masyarakat, sehingga yang seharusnya dilakukan dalam proses pembuatannya harus memenuhi persyaratan yang agar masyarakat tersebut merasakan langsung keterlibatan hukum secara positif.³

2. Pentingnya Efektivitas Hukum

Hukum bisa dibilang tidak efektif, apabila antara *law in books* (peraturan perundang-undangan) tidak sejalan dengan *law in actions* (perilaku masyarakat), sehingga timbul permasalahan. Inefektivitas hukum inilah yang mejadi dasar diperlukannya penelitian dan pengamatan hukum, untuk mengetahui penyebab serta menghilangkannya agar berjalannya suatu efektivitas hukum.⁴

3. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Berikut teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto :

² Ellya Rosana. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Lampung. Jurnal TAPIs Vol.10 No.1. Hal. 3.

³ Ellya Rosana.2013. *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*. Lampung. Jurnal TAPIs. Vol. 9 No.1. Hal. 101.

⁴ Zulfadli Barus. 2013. *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 2. Hal. 317.

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum serta disusun oleh pemerintah pusat ataupun daerah yang sah.

b. Faktor Penegak Hukum

Keseluruhan dari sistem penegakan hukum tentu dipengaruhi oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu, setiap aparat penegak hukum memiliki peran dan kedudukan masing-masing.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas dan sarana sangat penting untuk mengaktifkan serta menjalankan peraturan perundang-undangan tertentu. Sarana fisik menjadi bagian utama yang berfungsi sebagai pendukung pada ruang lingkungannya.

d. Faktor Masyarakat

Berikut faktor lain yang juga berkaitan dengan mengaktifkan suatu peraturan yaitu masyarakat. Maksudnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mematuhi peraturan Undang-Undang, yang dikenal dengan sebutan derajat kepatuhan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak terkait sesuatu

yang dianggap positif (dianut), dan sesuatu yang dianggap buruk (dihindari).⁵

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses menjalankan upaya untuk tegaknya fungsi norma-norma hukum secara langsung sebagai acuan perilaku dalam kehidupan masyarakat negara. Penegakan hukum dilihat dari segi subyeknya, merupakan upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan semua subyek hukum, siapapun kalangan yang menjalankan aturan normatif dengan menjadikan norma-norma aturan hukum sebagai dasar, dapat dikatakan ikut dalam menegakan aturan hukum.⁶

Adanya aparat penegak hukum ini sangat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Maka dari itu, setiap penegak hukum memiliki peran serta kedudukan masing-masing. Berhubungan dengan peran serta kedudukan yang dimilikinya maka, seluruh penegak hukum dituntut untuk mempunyai sikap dan perilaku profesional untuk menjalankan tugas. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan antara kedudukan dan peranan sesekali menjadi sebab timbulnya masalah. Lebih jelasnya, apabila dalam kenyataan timbul

⁵ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁶ Gentur Wasisto. 2015. *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Malang. Jurnal Ilmu Hukum.

kesenjangan terkait peranan yang seharusnya benar dan sejalan, maka bisa dikatakan terjadi kesenjangan peranan (*role-distance*).⁷

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terdiri dari :

a Lembaga Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan bertugas melindungi, melayani , serta menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat.

b Kejaksaan

Jaksa merupakan pejabat yang memiliki wewenang guna bertindak sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang.

c Peradilan umum

Peradilan umum merupakan salah satu proses sistem peradilan pidana yang tidak bisa terlaksana jika proses-proses seperti penyidikan dan penuntutan tidak dilakukan.

d Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat dilakukannya suatu pembinaan kepada nara pidana dan anggota lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

⁷ Ayu Amalia Kusuma. 2015. *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jurnal Societatis Vol. 3 No. 1. Hal. 66.

e Pengacara (Advokat)

Advokat merupakan individu yang melakukan praktek dalam pemberian jasa hukum, baik dalam ataupun diluar pengadilan yang melengkapi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang.⁸

C. Tugas dan Kewenangan Polisi Sebagai Penegak Hukum

1. Tugas Polisi Sebagai Penegak Hukum Pidana

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakan hukum, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.⁹ Sehubungan dengan derajat kepatuhan hukum, masyarakat menjadi salah satu tolak ukur berfungsinya hukum yang berlaku. Perilaku dan sikap masyarakat yang kurang sadar akan tugas polisi, seperti halnya tidak mendukung, namun mayoritas bersikap apatis bahkan menganggap tugas penegakan hukum hanyalah kewajiban aparat kepolisian saja, dan tidak mau terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Pemahaman tersebut yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.¹⁰

a. Wewenang Polisi Dalam Penyelidikan Tindak Pidana

Pada tindakan penyelidikan, terfokus pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga

⁸ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti. 2019. *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Semarang. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16 No.1.

⁹ Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Penerbit Pt Erlangga Mahameru. Sidoarjo.

¹⁰ Ellya Rosana. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Lampung. Jurnal TAPIs Vol.10 No.1. Hal. 18.

sebagai tindakan pidana, sedangkan pada penyidikan, ditekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.¹¹

Sedangkan tugas kepolisian meliputi tugas *revresive* (menekan), yaitu melakukan tindakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Tugas-tugas Kepolisian Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundangundangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas terbatas.¹²

b. Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan adalah salah satu Tugas Pokok Polri dalam rangka menjalankan penegakan hukum, didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

¹¹ Euis Desy Mayangsari dan Octaviani I. Ranakusuma. 2014. *Hubungan Regulasi Emosi Dan Kecemasan Pada Petugas Penyidik Polri Dan Penyidik Pns*. Jurnal Psikogenesis. Vol. 3 No 1. Hal.15.

¹² Asri Agsutiwi. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Proseding Seminar UNSA.

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”¹³

D. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku dan Jenis – Jenis Pelaku Tindak Pidana

Pelaku merupakan individu yang melakukan tindak pidana bersangkutan, dengan artian seseorang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja seperti penjelasan dalam Undang-Undang telah melakukan pelanggaran yang tergolong pada unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa harus melihat apakah upaya tindak pidana tersebut timbul sesuai kemauan diri sendiri maupun dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Proses pemidanaan lebih berorientasi pada seorang pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dalam artian pelaku dianggap sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab penuh dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁴

Pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana yaitu manusia (*naturlijk persoon*). Dapat disimpulkan dari rumusan tindak pidana pada undang-undang yang selalu dimulai dengan kata “barangsiapa” yang diartikan sebagai seseorang (manusia). Jenis – jenis pelaku tindak pidana bisa dikatakan bahwa, tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat

¹³ Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah dan Muhammad Akib. 2014. *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lampung. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. Vol. 1 No. 2. Hal. 35-52.

¹⁴ Eva Rosari Sitindaon. 2012. *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia*. Medan. Jurnal Ilmiah. Vol.1 No.1.

dijatuhkan tuntutan pidana dan apabila dianggap perlu dapat diberikan sanksi yang tercantum dalam Undang – Undang. Terhadap badan hukum “memerintah” menjalankan tindakan yang dilarang tersebut, atau kepada mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan perbuatan yang dilarang, terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama – sama.¹⁵

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan yang memenuhi beberapa unsur berikut :

a. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud dan tujuan suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi atas bantuan orang lain yang mendoktrin untuk melakukan suatu tindak pidana.

¹⁵ Eddy Rifai. 2014. *Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Lampung. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 26 No.1. Hal. 84-97.

- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya melakukan suatu perbuatan bersama-sama. Dalam tindak pidana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

- d. Orang yang dengan pemberian upah

Untuk memaksa atau membujuk seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain dengan memberikan upah untuk melangsungkan aksi atau perbuatannya.¹⁶

3. Pelaku Penyertaan

Pelaku penyertaan adalah seseorang atau beberapa orang dengan melakukan masing-masing perbuatan yang terlibat dalam kerjasama perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang tujuannya untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana.¹⁷

E. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut bahasa asing yaitu *criminal responsibility* yang tertuju pada pemidanaan pelaku guna menetapkan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan akibat tindak pidana yang dilakukan atau tidak dilakukannya. Agar pelaku dapat dipidana, diprioritaskan

¹⁶ Wilio Pratama. 2018. *Pertanggungjawaban Agen Penyalur Tenaga Kerja Ilegal Terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung. Penelitian Penulisan Hukum. Fakultas Hukum. UNPAS Hal.50-51.

¹⁷ Nurmalya Melati. 2016. *Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam*. Purwokerto. Hasil Penelitian. STAIN.

tindak pidana yang terjadi harus memiliki unsur-unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang. Ditinjau dari sisi tindakan yang dilarang, individu atau pelaku akan dipertanggungjawabkan akibat tindakannya, jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak memiliki alasan pembenaran serta menghilangkan unsur pelanggaran hukum mengenai pidana yang dilakukan. Sedangkan dari sisi kemampuan bertanggungjawab, dijelaskan bahwa individu yang bisa bertanggungjawab adalah dia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁸

Kemampuan pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan umur pelaku, dalam artian pelaku tersebut pada batas umur tertentu (diatas 18 tahun) sehingga mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukan. Menurut Pasal 44 KUHP pelaku tindak pidana yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dalam diri pelaku terdapat kesalahan seperti, pelaku mengalami cacat mental dan gangguan fisik oleh suatu penyakit yang dideritanya sehingga membuat pelaku tidak dapat membedakan baik buruknya suatu perbuatan, dengan begitu pelaku tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁹

F. Status Hukum Pelaku Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan beberapa status hukum terhadap pelaku tindak pidana :

¹⁸ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta . Penerbit Rangkang Education.

¹⁹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta.

1. Pelaku Baru Terduga

Merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 19).

2. Pelaku Tersangka

Merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14).

3. Pelaku Terdakwa

Merupakan seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15).

4. Pelaku Terpidana

Merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32).²⁰

G. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Kesalahan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, yang secara teori dapat dikatakan sebagai “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh seseorang, sehingga diberikan hukuman terhadap pelaku sangat dibutuhkan demi berjalannya tertib hukum dan jaminan kepentingan masyarakat umum”.²¹

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2016. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Pena Press. Kota Makassar.

Tindak pidana menurut Sianturi adalah singkatan dari kata”tindakan” yang merupakan setiap orang yang melakukan tindakan disebut penindak. Seperti apapun tindakan yang dilakukan, tapi dalam suatu hal tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu. Contohnya dalam golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan dalam golongan pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut beliau haruslah dicantumkan unsur”barang siapa”.²²

Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang tercantum dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum yang harus dipidana. Individu atau seseorang yang menjalankan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana jika memiliki kesalahan, seseorang memiliki kesalahan jika pada saat melakukan perbuatannya ditinjau dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative terkait kesalahan yang dilakukan.²³

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah:

a. Unsur-unsur formal :

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan

²² Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education.Yogyakarta.

²³ Arief Rachmanto.2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Yang Dilakukan Suporter Bola (Studi Kasus Di Gresik)*. Hasil Penelitian. Fakultas Hukum. Umm. Malang.

3) Perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²⁴

Istilah tindak pidana menurut Simons merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²⁵ Sedangkan kejahatan menurut Saherodji adalah perbuatan yang anti sosial dan perbuatan itu memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman serta tindakan.²⁶

2. Pengertian Kesalahan dan Jenis – Jenis Tindak Pidana

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan keadaan psikis tertentu pada seseorang yang menjalankan tindak pidana serta memiliki keterkaitan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sedemikian rupa sehingga individu tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan melanggar. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Pena Press. Kota Makassar.

²⁵ Fully Handayani R. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*.

²⁶ A. Rajamuddin. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*. Makassar. Jurnal Al-Risalah. Vol.15 No. 2.

dua komponen perilaku tindak pidana yaitu, keadaan psikis serta hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan adanya cela.²⁷

Sedangkan untuk jenis-jenis tindak pidana terdiri dari :

a. Tindak Pidana Formiel dan Materiel

Tindak pidana formiel merupakan terjadinya perbuatan dilarang yang dilakukan dan diancam pidana sesuai Undang-Undang. Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang terjadi apabila menimbulkan suatu akibat yang dilarang serta diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang.

b. Tindak Pidana Sederhana

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dasar dengan kata lain tergolong pada tindak pidana pokok.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Kealpaan

Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dengan sengaja dilakukan atau dijalankan. Tindak pidana kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi akibat dari kealpaan atau kesalahannya.

d. Tindak Pidana Politik dan Umum

Tindak pidana politik merupakan tindak pidana bertujuan pada suatu keamanan serta kepala negara. Sedangkan tindak pidana umum

²⁷ Hasrul Buamona. 2014. *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis* (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012). Yogyakarta. Jurnal Al-Mazahib. Vol. 2 No. 2.

merupakan tindak pidana yang tujuannya bukan terhadap keamanan serta kepala negara.

e. Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dikarenakan suatu kualitas hanya bisa dilakukan dan dijalankan oleh individu tertentu.²⁸

H. Tinjauan Tentang Pengertian dan Budaya Carok

1. Pengertian Carok

Carok pada umumnya diartikan sebagai bentuk kekerasan (baik berakhir dengan kematian atau tidak) yang dilakukan oleh orang madura, akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, carok merupakan konflik kekerasan orang Madura yang timbul dan disebabkan oleh persoalan harga diri, yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Carok adalah salah satu alternatif penyelesaian masalah atau sengketa pada masyarakat Madura. Lebih tepatnya adalah demi menjaga kehormatan sehingga menimbulkan perasaan malo (malu), perasaan malo ini yang menjadi faktor utama pemicu terjadinya carok. Karena merasa harga diri orang Madura dilecehkan, maka mereka akan beranggapan bahwa dirinya tidak berarti (*Tada'Badhinah*). Kemudian muncullah perasaan malo (malu) pada diri sendiri ataupun pada lingkungan sosial budaya mereka.²⁹

Peristiwa Carok cukup merepotkan bagi aparat penegak hukum, dikarenakan dapat menimbulkan korban relatif cukup banyak dan ada upaya

²⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Pena Press. Kota Makasar.

²⁹ Abd. Hamid. 2017. *Analisis Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Carok* (Studi di Kabupaten Sampang). Malang. Penelitian Penulisan Hukum. Fakultas Hukum. UMM. Hal.5.

balas dendam dari masing-masing kelompok yang bertikai, serta sewaktu-waktu bisa muncul kembali dalam suasana yang tak terduga. Ketika hukum dimata warga dipandang tidak dapat melindungi warga masyarakat dan memuaskan keadilan, maka timbullah kontrol sosial baru di masyarakat, yang dianggap benar oleh sebagian masyarakat. Meskipun dilakukan dengan cara kekerasan, seperti yang terjadi pada masyarakat Madura dengan perilaku caroknya.³⁰

2. Bentuk-bentuk Perbuatan Yang Terindikasi Dalam Perbuatan Carok

a. Mengancam untuk dibunuh

Merupakan situasi seseorang mengancam untuk melakukan pembunuhan terhadap individu lain, guna menyelesaikan suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi.

b. Mengajak untuk bertarung

Merupakan keadaan dimana seseorang mengajak untuk bertarung yang mengharuskan untuk melakukan pertarungan yang menyebabkan terjadinya carok “*mayuh mon acarok geh cong*” (ayo carok).

c. Melukai dengan menggunakan senjata are’ (clurit)

Merupakan tindakan seseorang dengan sengaja melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam yaitu *are’* (clurit).

³⁰ H.Cahyono. 2019. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekersan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Yogyakarta. Penerbit CV Budi Utama. Hal. 7.

d. Membunuh dengan menggunakan senjata *are'* (clurit)

Merupakan tindakan seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korbannya dengan menggunakan senjata tajam yaitu *are'* (clurit).

e. Pembunuhan dengan niat carok walaupun tidak dilakukan secara duel

Merupakan keadaan dimana seseorang melakukan upaya pembunuhan disertai dengan niat, seperti mempersiapkan alat (senjata tajam) guna melukai korbannya. Kejadian tersebut terkadang dilakukan secara langsung memanfaatkan lengahnya korban, sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan.

f. Carok dengan mengupah pembunuh bayaran

Merupakan kejadian carok yang dilakukan dengan sengaja membayar orang lain untuk melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap sasarannya (pembunuh bayaran).

3. Budaya Carok

Budaya merupakan suatu cara hidup yang terjadi pada sekelompok manusia, yang berkembang serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, sastra, lukisan, nyanyian, musik, menjadi kepercayaan yang mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan pada masyarakatnya. Carok adalah suatu kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita, lebih tepatnya kebudayaan itu ada untuk

menjaga harkat dan martabat seseorang yang merasa harga dirinya dipermalukan.³¹

Sebagaimana ciri, kekhasan, keunikan, serta identity budaya yang dimiliki oleh berbagai suku dan adat di wilayah lainnya, budaya Madura juga mempunyai ke-khasan yang mana dianggap sebagai jati diri individual dan komunal etnik Madura dalam berperilaku bahkan berkehidupan yang salahsatunya sikap tetap memegang teguh harga diri. Orang Madura sangat tidak rela jika harga dirinya dilecehkan, dalam hal ini terdapat istilah “*lebbhi bagus pote tolang katenbang pote mata*” (lebih baik mati dari pada hidup menanggung malu).³²

4. Tindak Pidana Carok

Carok termasuk dalam kriteria tindak pidana pembunuhan berencana karena “*e peddheng*” (di bacok) musuhnya dari belakang istilah yang dipakai oleh orang Madura disebut “nyalep”, atau dengan cara menghadang musuh di jalan setelah itu membunuhnya. Perbuatan ini melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga masyarakat Madura yang melakukan Carok harus menjalani sanksi hukuman penjara selama bertahun-tahun sebagai pelaku tindak pidana berat. Menurut KUHP, mereka dikenakan ancaman sanksi hukuman pidana berupa kurungan penjara maksimal

³¹ Muhammad Afif. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*. Soumatara. Jurnal Law Review. Vol. 1 No 2. Hal. 303.

³² Muwaffiq Jufri. 2017. *Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok*. Pamekasan. Jurnal Yustitia. Vol. 18 No. 1. Hal. 15.

hukuman mati, sanksi penjara kurungan seumur hidup, atau sanksi kurungan penjara selama-lamanya 20 tahun.³³

Carok telah menjadi istilah yang mengartikan makna tertentu yaitu, suatu perkelahian bahkan pembunuhan atau penganiayaan dengan alasan yang khusus terkait kajian sosiologis dapat dikatakan secara khusus carok merupakan suatu kebiasaan atau pola perilaku masyarakat Madura fungsinya sebagai suatu modus. Seringkali dilakukan secara sepihak untuk menyelesaikan sengketa menyangkut soal martabat dan harga diri, carok adalah suatu perkelahian bersenjata tajam antara individu dengan individu lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain yang lazim disetujui terlebih dahulu dengan perjanjian perihal waktu dan tempat.³⁴

Perkelahian diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, perkelahian atau tanding biasanya diawali dengan tantangan seseorang untuk berkelahi yang mengakibatkan adanya penganiayaan yang terjadi ketika perkelahian berlangsung.³⁵

Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya niat terlebih dahulu maka dikenakan sanksi penjara maksimal 15 tahun.³⁶

³³ Mahmudi. 2015. *Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Sampang Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 1.

³⁴ Erie Hariyanto. 2012. *Carok Vs Hukum Pidana Indonesia* (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia). Malang, Jurnal Karsa. Vol. 12 No.2. Hal. 181.

³⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Pasal 351 ayat 1 Tentang, *Penganiayaan*.

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Pasal 338 Tentang, *Pembunuhan biasa*.

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, menghilangkan nyawa orang lain yang didahului dengan berencana, pelaku carok dalam aksinya sering menggunakan aturan berencana terlebih dahulu, menentukan waktu dan tempat agar targetnya bisa terbunuh, perbuatan ini akan dipidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.³⁷

5. Unsur – Unsur Tindak Pidana Carok

- a. Carok merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata are' (clurit) maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam Pasal 338 (pembunuhan) “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
- b. Carok merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana terlebih dahulu sebelum membunuh, maka unsur tersebut telah terpenuhi pada Pasal 340 (pembunuhan berencana) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”
- c. Carok merupakan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, karena sebelum pelaku membunuh korban biasanya dilakukan penganiayaan atau menyiksanya terlebih dahulu, maka unsur tersebut telah terpenuhi pada

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 Tentang, *Pembunuhan berencana*.

Pasal 351 (penganiayaan) (1) Penganiayaan dipidana dengan sanksi penjara maksimal dua tahun delapan bulan. (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal lima tahun. (3) Jika perbuatan itu berakibat hilangnya nyawa seseorang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun.³⁸



³⁸ Emy Handayani dan Fatih Misbah. 2019. *Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif*. Semarang. Jurnal Crepido. Vol 1. No.1. Hal. 23-31.